



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2006-2007**

SENIN, 7 MEI 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2006-2007**

SENIN, 7 MEI 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2006—2007

SENIN, 7 MEI 2007



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.*

**Yang Terhormat Para Wakil Ketua,
Yang Terhormat Para Anggota Dewan,
Sidang Dewan yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bertemu kembali hari ini pada acara Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006—2007 yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2007.

Dari catatan Sekretariat Jenderal, ... anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap **Bismillahirrahmanirahim**, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006—2007, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1), maka rapat paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV, perlu Pimpinan menginformasikan beberapa surat masuk, yaitu surat masuk dari Presiden RI No. R-23/Pres/4/2007 tentang

Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; surat dari Ketua Komnas HAM No. 137/TUA/IV/2007 tentang pencalonan 43 (empat puluh tiga) orang untuk memperoleh seleksi dari DPR dalam rangka mengisi kekosongan seluruh keanggotaan Komnas HAM yang akan berakhir tanggal 31 Agustus 2007 mendatang, sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang KOMNAS HAM; surat dari Badan Legislasi Nomor 56/BALEG/DPR RI/II/2007 tentang Penyampaian Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI atas RUU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Semua surat-surat tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan mekanisme Dewan.

Perlu juga kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan Komisi terkait telah melakukan pembahasan terhadap surat Presiden No. 18/Pres/4/2007 dan Surat No. 19/Pres/4/2007 tentang Permohonan Persetujuan Duta Besar Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah, Masa Sidang IV yang berlangsung dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Juli 2007 akan berjalan selama 52 hari kerja atau 75 hari kalender. Pada Masa Sidang IV ini Dewan akan melaksanakan fungsi dan wewenang konstitusionalnya dalam melaksanakan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan akan memulai melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2008. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pada pertengahan bulan Mei setiap tahun, Dewan bersama Pemerintah membahas berbagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (RKA-KL), satu tahun anggaran ke depan. Oleh karena itu, komisi-komisi Dewan dalam masa sidang yang sekarang ini akan melakukan rapat-rapat kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008 yang bersifat **kualitatif**, sedangkan pembahasan dalam bentuk **kuantitatif** akan mulai dilakukan dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2007—2008. Dalam proses persiapan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2008 mendatang, Dewan meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk tetap berpegang kepada 8 (delapan) prioritas

program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008.

Seiring dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan juga akan menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Negara Tahun 2005 oleh Panitia Anggaran. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Negara Tahun 2005 ini adalah dalam konteks siklus anggaran yang dimulai dari proses penyusunan sampai pertanggungjawabannya yang melibatkan Dewan. Dalam fungsi anggaran ini pun, Dewan akan menindaklanjuti keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2006 sebagai bahan pertimbangan DPR RI dalam penyusunan RUU APBN Tahun 2008.

Berkaitan dengan masalah anggaran, Dewan menaruh perhatian terhadap tidak lancarnya realisasi proyek di beberapa daerah yang dikhawatirkan gagal terlaksana untuk tahun 2007, karena adanya keterlambatan pengesahan APBD yang berakibat pada keterlambatan pula penyerahannya kepada Pemerintah Pusat. Ini sangat berkaitan dengan masalah disiplin anggaran. Kalangan Dewan khawatir kalau keterlambatan ini karena adanya faktor-faktor politis. Apabila Pemerintah Daerah dan DPRD tidak menegakkan disiplin anggaran, termasuk disiplin ketepatan waktu pengesahan APBD, maka akan berdampak luas terhadap pembangunan daerah dan efektivitas pelayanan publik. Proyek-proyek pembangunan jelas akan terhambat serta pelayanan publik akan terganggu. Dengan demikian akan menghambat pula pertumbuhan pembangunan sektor riil di masyarakat. Sampai saat ini porsi dana perimbangan terhadap APBD masih cukup besar yakni berkisar 75% sampai 85% dari total APBD provinsi, kabupaten dan kota. Dewan sependapat dengan Pemerintah Pusat untuk menjatuhkan sanksi kepada daerah, apabila daerah tidak menyampaikan APBD daerahnya masing-masing tepat waktu. Untuk itu, kepada daerah-daerah, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan IV ini diharapkan paling tidak dapat diselesaikan 15 RUU, terdiri dari 8 RUU Pemekaran Wilayah dan 7 RUU lainnya baik yang datang dari DPR maupun dari Pemerintah. RUU-RUU tersebut antara lain RUU

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik; RUU Ombudsman Republik Indonesia; RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir; RUU Pertambangan Mineral dan Batubara; RUU Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Paket RUU bidang Perpajakan terutama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan RUU Perseroan Terbatas.

Dewan menghendaki dapat memproses lebih lanjut atas 55 RUU yang telah menjadi prioritas penanganannya khususnya RUU-RUU yang sedang dan akan memasuki Pembicaraan Tingkat I. Sementara itu, Dewan sangat menantikan masuknya 4 paket RUU perubahan UU bidang politik yang diharapkan masuk pada awal masa persidangan ini. Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007 – 2008, paket RUU bidang politik diharapkan dapat selesai dibahas. Dengan demikian ada waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan peraturan pemerintah dan aturan-aturan lain yang terkait bagi kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2009, menyusul telah diselesaikannya RUU Penyelenggara Pemilu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam masa sidang ini akan ditangani oleh komisi-komisi Dewan dalam membahas masalah-masalah yang berkembang. Dalam pelaksanaan fungsi ini, akan terfokus utamanya pada pelaksanaan hak anggota DPR yang kemungkinan akan segera mendapatkan persetujuan DPR yaitu *Hak Interpelasi* terhadap kebijakan Pemerintah yang menyetujui Resolusi DK-PBB No. 1747, melalui mekanisme di dalam rapat Badan Musyawarah DPR RI. Dewan akan menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas pembahasan dalam masa persidangan ini. Penggunaan hak interpelasi ini merupakan wujud penting dari fungsi pengawasan DPR atas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dewan berharap, penggunaan hak interpelasi ini dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat yang tidak puas atas sikap yang telah diambil oleh Pemerintah RI di forum DK-PBB. Dewan berharap, apabila interpelasi ini disetujui, Presiden dapat menyampaikan langsung dalam forum rapat paripurna Dewan dan dapat memanfaatkan momentum penting tersebut sebagai sarana untuk melakukan penjelasan langsung dalam masalah-masalah kebijakan luar negeri RI atas dasar politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa masalah yang sedang berkembang akhir-akhir ini tidak luput dari perhatian Dewan. Di bidang politik, masyarakat dan rakyat Indonesia menunggu keputusan diumumkannya **reshuffle** kabinet oleh Presiden SBY. Dalam beberapa bulan ini, isu reshuffle kabinet telah menjadi wacana yang mengemuka akibat menurunnya popularitas Presiden dan pemerintahannya. Masyarakat, politisi, para pakar dan bahkan media massa secara gencar mengatakan bahwa reshuffle adalah suatu **kebutuhan** dalam meningkatkan efektifitas pemerintahan untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Sekarang ini proses reshuffle kabinet sudah dalam tahap akhir dan nampaknya hari-hari ini Presiden sesuai kewenangannya akan segera mengumumkannya. Reshuffle ini akan dapat mengakhiri spekulasi yang selama ini berkembang yang berpotensi menciptakan iklim politik yang tidak sehat.

Bagi masyarakat yang penting bukan siapa yang akan duduk dalam kabinet, tetapi yang lebih diinginkan adalah bahwa dengan perombakan kabinet yang kedua ini aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Dewan dan masyarakat mengharapkan agar Presiden dapat memilih pembantu-pembantunya yang terbaik dengan mengedepankan kualifikasi dan kompetensi, yang akan menciptakan **teamwork** yang lebih baik dari kabinet sebelumnya, dapat meningkatkan kinerja pemerintah, melakukan optimalisasi tugas-tugas dengan mengedepankan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki keadaan, dalam sisa masa jabatan dua setengah tahun ke depan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hal lain yang mendapat perhatian masyarakat dan Dewan, terkait dengan kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir, yang saat ini belum tuntas. Telah dibebaskannya Pollicarpus beberapa bulan lalu atas keputusan Mahkamah Agung, merupakan tantangan baru bagi penegak hukum untuk bekerja lebih keras dalam mengungkap kasus ini. Upaya penuntasan kasus Munir ini harus dilakukan dengan serius, cermat, dan profesional, karena penyelesaian kasus ini akan menjadi batu ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Dewan berharap Polri dapat menemukan pelaku yang sebenarnya atas kematian Munir. Kasus ini tidak saja mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia tetapi juga oleh dunia Internasional. Semakin cepat kasus ini diselesaikan,

maka kita dapat menghindari adanya keinginan campur tangan pihak luar.

Sementara itu, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura, telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dengan disaksikan oleh Kepala Pemerintahan masing-masing di Istana Tampak Siring, Bali tanggal 27 April 2007 beberapa hari yang lalu. Perjanjian ini mencakup 31 kejahatan, dengan berlaku surut 15 tahun, dan mulai sah berlaku setelah diratifikasi oleh kedua parlemen dari kedua negara. Oleh karena itu, Dewan mengharapkan Pemerintah dapat segera menyampaikan RUU ratifikasi ke DPR untuk segera memperoleh prioritas pembahasan. Kita semua mengetahui bahwa perjanjian ini telah memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu lebih dari 30 tahun.

Indonesia sangat antusias untuk menuntaskan perjanjian ekstradisi ini, karena ini merupakan landasan bagi penyelesaian persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan para pelaku tindak pidana korupsi termasuk kasus BLBI yang sebagian nyata-nyata telah bersembunyi di Singapura, bahkan disinyalir menyimpan uang hasil kejahatannya di negara tersebut. Muatan materi yang tertuang di dalam perjanjian ekstradisi ini harus berimbang, artinya kepentingan Indonesia harus benar-benar terakomodir. Kita tahu bahwa perjanjian ekstradisi ini bukan satu-satunya jalan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Perjanjian ekstradisi tidak ada artinya, apabila pemerintah kita tidak benar-benar konsisten di dalam penegakan hukum.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani perjanjian pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura, serta Perjanjian antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Singapura mengenai daerah latihan militer di Indonesia. Dengan perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara kita mengharapkan agar kedaulatan RI tetap terjaga, artinya jangan sampai dengan perjanjian tersebut, Indonesia akan dirugikan dari segi pertahanan dan keamanan wilayah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Peristiwa lain yang mendapatkan sorotan dari Dewan adalah tindak kekerasan yang terjadi lagi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang lagi-lagi menewaskan seorang mahasiswa tingkat II IPDN awal bulan lalu. Peristiwa ini telah langsung ditangani oleh aparat kepolisian yang telah melakukan tindakan cepat yang menahan para tersangka. Presiden juga telah melakukan langkah cepat dengan

membentuk tim untuk mengkaji, dan memberikan saran pertimbangan atas institut pendidikan ini secara menyeluruh, termasuk penundaan penerimaan praja baru selama satu tahun sampai terbentuknya penataan ulang di lembaga ini.

Masyarakat menyaksikan dengan kasat mata rekaman gambar di media elektronik tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para senior kepada yuniornya, dan ini berlangsung terus menerus. Nurani kita benar-benar tersentuh manakala menyaksikan rekaman gambar penyiksaan tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang akan diambil terhadap institusi pendidikan yang dikelola Departemen Dalam Negeri ini, perlu dilakukan segera, dan supaya dapat diharmonisasikan pelaksanaannya sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Dewan juga merasa prihatin dan menyesalkan terlambatnya eksekusi para terpidana penganiayaan terhadap praja Wahyu Hidayat, oleh institusi penegak hukum. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya apabila Komisi II DPR RI dapat memantau pelaksanaan dari proses penyelesaian permasalahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karena lembaga pendidikan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sangat ideal dalam menyiapkan para pamong praja yang akan bertugas dan menduduki jabatan di beberapa daerah. Namun ternyata, proses pendidikan ini termasuk metode pembinaan pengajarannya telah menyimpang dari asas-asas pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan telah ditetapkannya anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) untuk melaksanakan amanat UU Nomor 19 tahun 2007 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, pada kesempatan ini Dewan menyampaikan ucapan “Selamat”, dengan harapan bahwa para anggota DPP akan benar-benar bekerja secara profesional sesuai dengan kemampuannya dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden ini tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain/unit-unit kerja di bawah lembaga kepresidenan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam bidang ekonomi, perhatian Dewan tertuju kepada program penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, baik

dalam Tahun Anggaran 2007 maupun untuk Tahun Anggaran 2008. Dari data SUSENAS Tahun 2006 penduduk miskin Indonesia kurang lebih 39,10 juta orang per akhir Maret 2006. Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, di dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah harus memiliki program yang bersifat jangka panjang dan mendasar, tidak lagi hanya program-program yang berjangka pendek, lebih-lebih karena pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI (TKPKRI). Program nasional mengenai hal ini difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat di kecamatan-kecamatan dan di wilayah-wilayah di bawahnya. Hendaknya program ini tidak diterjemahkan sebagai "*bagi-bagi uang*" seperti halnya program bantuan langsung tunai (BLT). Program penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan usaha-usaha mikro dan usaha kecil di perkotaan dan di pedesaan yang didukung oleh anggaran Negara bekerja sama dengan bank BUMN sebagai pembina langsung.

Dalam pada itu, memasuki bulan Mei tahun 2007, permasalahan yang belum terselesaikan antara lain masalah ketahanan pangan, seperti minimnya cadangan beras nasional dan melonjaknya harga beras di pasar, lambannya pertumbuhan sektor riil, kinerja beberapa BUMN yang terus merugi.

Berdasarkan data, sampai akhir April ini cadangan beras nasional termasuk Cadangan Beras Pemerintah yang ada di BULOG baru mencapai 709.000 ton. Menurut perhitungan dari Organisasi Pangan dan Pertanian se-Dunia (*Food and Agriculture Organisation*), jumlah cadangan beras nasional di tanah air seyogyanya minimal 4.000.000 ton per tahun atau 2% dari jumlah penduduk. Dengan akan dimulainya musim panen di berbagai daerah, Dewan meminta BULOG untuk meningkatkan pembelian gabah atau beras dari petani di berbagai daerah sentra produksi pertanian sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, kelambanan pertumbuhan sektor riil juga menjadi perhatian serius Dewan. Mengingat salah satu persoalan pokok yang dihadapi sektor riil saat ini adalah kurangnya dukungan perbankan nasional. Padahal dana pihak ketiga di lembaga perbankan jumlahnya cukup besar. Hal ini berbeda dengan tingkat penyaluran kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang *Loan to Deposit Ratio*-nya sudah rata-rata mencapai angka 100%. Dewan menilai perbankan nasional masih saja ragu dan bahkan sebagian besar bank di tanah air, termasuk bank-bank BUMN lebih memilih membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari pada menyalurkan kredit kepada sektor riil, padahal Bank Indonesia

sudah menurunkan tingkat suku bunga SBI menjadi 9%. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka upaya untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6,3% tahun 2007 ini akan terganggu dan sektor riil tidak akan berjalan dan sulit diharapkan menyerap angkatan kerja baru.

Masalah kinerja BUMN juga mendapat pengamatan Dewan. Sampai saat ini jumlah perusahaan negara atau BUMN masih cukup banyak, dengan jumlah aset yang dimiliki kurang lebih Rp 1.400 triliun. Namun, kinerjanya masih saja memprihatinkan. Bahkan, ada BUMN yang terus-menerus merugi. Untuk itu, harus dilakukan pengawasan secara intensif atas kinerja seluruh BUMN dan kinerja Kementerian Negara BUMN melalui komisi Dewan terkait. Diharapkan, kedepan, BUMN dapat lebih mandiri dan dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Oleh karena itu, kepada BUMN yang terus merugi, perlu dilakukan restrukturisasi/perampingan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah Ujian Nasional (UN) tak pernah luput dari perhatian Dewan. Masalah ini menjadi sorotan banyak kalangan, karena menyangkut kepentingan masa depan anak-anak bangsa. Hal yang sangat dikhawatirkan masyarakat adalah hasil UN telah digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik, yang saat ini dirasakan tidak relevan untuk diterapkan, karena peserta didik di seluruh Indonesia berbeda-beda tingkat kemampuannya. Pada wilayah yang maju pada umumnya nilai peserta didik lebih tinggi dibanding nilai peserta didik di wilayah tertinggal. Oleh karena itu, kalangan Dewan mendorong kepada Pemerintah untuk kembali pada ketentuan yang ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dengan demikian, pemaksaan ketentuan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan dipandang bertentangan dengan undang-undang.

Masalah peruntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun juga tak lepas dari perhatian kita selama ini, dimana Pemerintah menargetkan program tersebut dapat dituntaskan pada tahun 2008. Dalam hal ini Dewan menilai semangat pemerintah untuk penuntasan program tersebut sangatlah berlebihan, karena sesungguhnya masih banyak masalah yang belum jelas penyelesaiannya, baik yang berkaitan

dengan anggaran, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Wajar 9 Tahun di lapangan. Oleh karena itu, Dewan mendesak dilakukannya pembentukan suatu gugus tugas (*task force*) yang akan berfungsi untuk mengkoordinasikan program tersebut. Dikaitkan dengan istilah wajib belajar, baik yang digunakan dalam UUD 1945 maupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Dewan mendesak pemerintah untuk memberi perhatian dan anggaran yang lebih memadai kepada Pendidikan Non Formal (PNF). Penuntasan program wajib belajar tidak tepat jika dimaknai sebatas peraturan wajib sekolah. Karena itu pula, inovasi-inovasi kreatif di bidang pendidikan yang menjangkau makin banyak masyarakat, mutlak perlu dilakukan. Masalah sertifikasi guru juga menjadi perhatian kita selama ini. Sertifikasi guru terus tertunda sampai kini, dan jika tidak segera diwujudkan lambat laun dapat mengikis kepercayaan para guru akan komitmen Pemerintah pada pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rencana pemerintah untuk menerbitkan RPP dalam masalah ini, diharapkan tidak makin mempersulit peningkatan kualitas dan kesejahteraan Guru dan Dosen.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan lain yang masih saja menyita perhatian kita semua adalah berkaitan dengan masalah lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur yang tidak menyusut bahkan nampak makin tidak teratas. Tim Nasional sudah berhenti dan digantikan badan baru yang diharapkan dapat menuntaskan dan menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan lumpur panas sebagai akibat pengeboran minyak PT Lapindo Brantas. Penanganan ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas kepada masyarakat yang menjadi korban juga belum tuntas, sementara itu kerusakan infrastruktur makin parah. Melihat perkembangan yang terus terjadi, Dewan berpendapat bahwa masalah lumpur panas di Sidoarjo tersebut telah meluas di luar batas kemampuan PT Lapindo Brantas sebagai pemicu munculnya bencana ini. Dewan juga berpendapat bahwa Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih berarti, dalam menyelamatkan masyarakat setempat sesuai konstitusi kita, dimana Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi hak-hak warga Negara. Kesinambungan pembangunan ekonomi di sekitar lokasi pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya perlu diselamatkan dan dijaga.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam konteks diplomasi keparlemenan dan aktivitas Dewan di forum-forum internasional, perlu kami informasikan bahwa Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-116 di Nusa Dua, Bali dari tanggal 29 April 2007 sampai dengan 4 Mei 2007 telah berjalan dengan sukses dan lancar, termasuk dari segi keamanan, walaupun kita tahu bahwa untuk mempersiapkan kegiatan besar ini waktunya sangat terbatas, hanya sekitar lima bulan. Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah mengantikan Thailand, yang keanggotaannya di IPU dibekukan sebagai akibat situasi di dalam negeri negara tersebut.

Sidang ini telah dihadiri oleh lebih dari 1300 peserta, dari 126 Parlemen Negara Anggota IPU, 5 Associate Members, 28 Observers dari organisasi internasional, para Sekjen Parlemen se-dunia, dan dari kalangan pers.

Sidang telah membahas 4 agenda pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Agenda pokok di *general debate* adalah pembahasan issue tentang "***Global Warming***". Delegasi Indonesia telah berpartisipasi aktif dan telah mendapat kepercayaan untuk memimpin Sidang Pleno, Sidang-sidang Komisi termasuk Sidang Parlemen Wanita, Panel Diskusi dan duduk dalam Tim Perumus. Atas inisiatif Indonesia, Sidang IPU kali ini juga melahirkan ***Presidential Statement*** tentang Perubahan Iklim (*climate change*).

Sidang IPU ke 116 juga telah membahas agenda tambahan dengan judul "***International Cooperation to Combat Terrorism, Its Root Causes and Its Financing, Including Cross-Border Funding***" yang diusulkan oleh : Indonesia, India, Algeria, dan Republik Islam Iran.

Dalam agenda tambahan (*emergency item*) ini, Indonesia telah berhasil memasukkan klausul tentang seruan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dari wilayah Irak, walaupun ada beberapa pihak yang berupaya menggagalkan *emergency item* ini sejak awal. Namun dengan kegigihan delegasi Indonesia, akhirnya resolusi ini berhasil disepakati. Atas materi ini Indonesia mendapat dukungan dari banyak delegasi. Bahkan dalam pidato Pembukaan Sidang Umum IPU ke-116, masalah demokratisasi dan hak-hak sipil yang tidak berjalan di Myanmar dan juga masalah situasi Thailand yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat proses pergantian kepemimpinan yang tidak demokratis, mendapat simpati dari para peserta sidang.

Masalah krisis kemanusiaan dan perang saudara di beberapa Negara di Afrika juga dikemukakan di dalam forum yang bergengsi tersebut.

Di sela-sela berlangsungnya Sidang IPU ini, tidak kurang dari 30 delegasi Parlemen telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR-RI yang juga menjabat sebagai President Assembly 116th IPU dan juga pertemuan bilateral dengan delegasi DPR-RI.

Dengan suksesnya sidang IPU ini, baik dari segi substansi maupun dari segi penyelenggaraan, diharapkan akan mengangkat citra Indonesia di forum internasional dan khususnya untuk masyarakat Bali dapat memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat internasional sebagai daerah utama wisata di dunia, setelah dua kali mengalami keterpurukan akibat bom Bali.

Beberapa masalah lain juga sempat mendapat perhatian Dewan antara lain, hasil pertemuan *Extra Ordinary Executive Committee Meeting* di Kuala Lumpur beberapa hari lalu yang dihadiri oleh ketua-ketua parlemen Anggota ASEAN. Pertemuan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 17—18 April 2007. Dari hasil keputusan yang dicapai antara lain, ditandatanganinya Statuta baru AIPA menjadi AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*). Keputusan lain adalah telah ditetapkannya Sekjen AIPA yang permanen dengan masa jabatan tiga tahun dari Malaysia, yang akan berdomisili di Jakarta dan berkantor di Gedung DPR RI. Penetapan Sekjen permanen ini dimaksudkan agar organisasi parlemen regional ini dapat melaksanakan tugas secara efektif dan melaksanakan transformasi AIPA untuk bersama-sama ASEAN membangun kebersamaan demi masa depan kedua organisasi kawasan ini.

Dalam kaitan dengan masalah internasional, baru-baru ini kita mendengar bahwa mantan Presiden Rusia, Boris Yeltsin telah meninggal dunia karena serangan jantung. Sebagai pemimpin/mantan pemimpin dunia, masyarakat internasional melepas kepergiannya untuk menghadap Tuhan dengan rasa duka. Lepas dari kelemahan Yeltsin sebagai pemimpin, namanya tetap dianggap besar karena peranannya di dalam memperkuat jalan menuju demokrasi di Negara Rusia. Dia turut berperan dalam mengubah sistem totaliter yang telah berlangsung selama tujuh dekade. Ia adalah salah satu pemimpin dunia di masanya yang cukup disegani, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga oleh masyarakat internasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai akhir pidato pembukaan ini, saya mengajak kepada segenap Anggota Dewan untuk terus bekerja keras dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab konstitusional Dewan, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Semoga Allah SWT meridhoi kita dalam mengemban amanat rakyat. Demikianlah pidato saya dalam acara Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV DPR Tahun Sidang 2006-2007.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 Mei 2007

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H.R. AGUNG LAKSONO